



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 746-755

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Agus Dwi Atmoko¹, Nur Setia Rahayu²

¹²Program Studi Akuntansi, Politeknik Sawunggalih Aji

Email: agus.ak@polsa.ac.id

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlung Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,689 yang artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 68%. Secara simultan Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlung Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Secara parsial analisis ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlung Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlung Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1. Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

ayat 1).

Perhatian terhadap desa di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri Alokasi Dana Desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah), salah satunya dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka.

Alokasi Dana desa yang diterima dari pemerintah kabupaten harus benar-benar membuat kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kadang masih ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaannya karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu

keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. Masalah tersebut seperti, masyarakat Desa Panggeldlangu secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa. Sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Selain itu, masyarakat Desa Panggeldlangu tidak mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana itu dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengambil judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo”.

2. Metode Penelitian

1. Kuisioner/Angket

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2010:142) Peneliti memberi pernyataan tertulis kepada Ketua RT, Ketua RW, BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa, Pengurus PKK, Pengurus LPMD dan PLD Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju” dan “sangat setuju”. Skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 5 | = | SS (Sangat Setuju) |
| 4 | = | S (Setuju) |
| 3 | = | N (Netral) |
| 2 | = | TS (Tidak Setuju) |
| 1 | = | STS (Sangat Tidak Setuju) |

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dalam penelitian. (Riduwan, 2011:31) Peneliti mempelajari gambaran umum atau profil Desa Panggeldlangu.

3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber buku dari beberapa media lainnya sebagai referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Lokasi, Obyek, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Desa yang beralamat di Desa Panggeldlangu Rt 01/02, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan pada saat pelaksanaan Tugas Akhir di Kantor Desa Panggeldlangu, yang dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2019.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Abdul Halim dan Muhamad Ikbal, 2012:83)

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004: 30), transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil setiap pengambilan keputusan.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima dari kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 pengelolaan alokasi dana desa adalah:

1. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain- lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pengertian dan Pemahaman Statistical Package for Social Sciences (SPSS)

SPSS adalah kepanjangan dari Statistical Package for Social Sciences (SPSS) adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. (Ghazali, 2011:15) Menurut Riduwan dkk (2015:5), setelah membuka layar kerja SPSS pada layar monitor tampak dua model layar kerja. Layar kerja yang pertama adalah layar kerja untuk memasukkan data (Data view). Layar kerja yang kedua adalah layar kerja untuk memasukkan dan aturan terkait dengan variabel (variabel view).

Bagian utama menu program IBM SPSS Versi 20.0 menurut Hengky dan Selva adalah sebagai berikut:

1. Menu File

Menu file terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk membuat file data baru, menginput data yang akan dianalisis, menyimpan data, mengeksport data, memberi nama, dan sebagainya.

2. Menu Edit

Menu edit terdiri dari beberapa submenu, antara lain:

- a. Undo berfungsi untuk mengembalikan perubahan terakhir yang dilakukan.

- b. Cut berfungsi untuk menghapus object dengan memilih file data tertentu.
- c. Copy berfungsi untuk mengkopi object dengan memilih file data tertentu.
- d. Paste berfungsi untuk memperbanyak object dengan menu copy kemudian paste dan sebagainya.

3. Menu View

Menu View terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk mengatur status bar, toolbars, front, grid lines dan sebagainya.

4. Data

Menu data terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi pengaturan data dan variabel untuk analisis

5. Transform

Menu Transform terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk membuat variabel baru dan mengatur variabel.

6. Menu Analyze

Menu Analyze terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk memilih teknik analisis seperti statistik deskriptif, general linier model (GLM), mixed models, regression, nonparametric test dan sebagainya.

7. Direct Marketing

Menu Direct Marketing terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk proses analisis marketing seperti identify my best contacts, segment my contacts dengan analisis kluster, control package test dan sebagainya.

8. Graphs

Menu Graphs terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk membuat graphs seperti histogram, scatter, population pyramid dan sebagainya.

9. Utilities

Menu Utilities terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk define variabel, melihat variabel, run script dan sebagainya.

10. Add-ons

Menu Add-ons terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk application, services, programmability extension dan statistics guides.

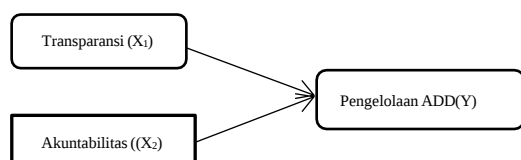
11. Window

Menu Window terdiri dari beberapa submenu yang berfungsi untuk menyimpan sesi pekerjaan IBM SPSS Versi 20.0.

12. Help

Menu Help terdiri dari beberapa submenu yang dapat digunakan untuk membantu penjelasan terkait adanya masalah dalam pengoperasian program IBM SPSS Versi 20.0.

Kerangka Penelitian



Perumusan Hipotesis

Pada prinsipnya perumusan hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan/atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Tanjung, 2014:9). Penelitian yang dilakukan Debi (2015) yang menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money. Kemudian penelitian yang dilakukan Risyia Umami (2017) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. (Peny Kusumastuti, 2014:2). Dalam penelitian yang dilakukan Debi (2015) bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money. Kemudian penelitian yang dilakukan Risyia Umami (2017) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

H0 : Tidak ada hubungan. Ha : Ada Hubungan

Berdasarkan hipotesis diatas, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

H01 : Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo..

Ha1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo..

H02 : Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Ha2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Panggeldlangu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya diolah menggunakan SPSS. Adapun waktu yang dikumpulkan kuesioner-kuesioner tersebut kurang lebih selama 1 minggu.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada Ketua RT, Ketua RW, BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa, Pengurus PKK, Pengurus LPMD dan PLD Desa Panggeldlangu yang berada di Desa Panggeldlangu.

Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi Hasil Skor Kuisisioner

Tabel 1 Uji Normalitas Data

Statistics				
		Transparansi	Akuntabilitas	padd
N	Valid	8	8	6
	Missing	0	0	2
Mean		114,88	110,63	119,83
Median		118,50	118,00	121,00
Mode		84 ^a	123	121
Std. Deviation		16,128	19,935	6,585
Minimum		84	67	107
Maximum		131	126	126

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan tabel 4.1 variabel transparansi menunjukkan nilai minimum 84 dan maksimum 131. Hal ini berarti jumlah skor kuisisioner variabel transparansi paling banyak berjumlah 131 dan paling sedikit berjumlah 84.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.561>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Nilai mean dan median variabel transparansi sebesar 114,88 dan 118,50. Hal ini berarti rata-rata jumlah skor kuisioner variabel transparansi berjumlah sebesar 114,88 dan nilai tengah berjumlah 118,50. Nilai standar deviasi sebesar 16,128.

Pada variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum 67 dan maksimum 126. Hal ini berarti jumlah skor kuisioner variabel transparansi paling banyak berjumlah 126 dan paling sedikit berjumlah 67. Nilai mean, median dan modus variabel akuntabilitas sebesar 110,63, 118,00 dan 123. Hal ini berarti rata-rata jumlah skor kuisioner variabel transparansi berjumlah sebesar 110,63, nilai tengah berjumlah 118,00 dan nilai yang sering muncul 123. Nilai standar deviasi sebesar 19,935.

Pada variabel pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan nilai minimum 107 dan maksimum 126. Hal ini berarti jumlah skor kuisioner variabel pengelolaan alokasi dana desa paling banyak berjumlah 126 dan paling sedikit berjumlah 107. Nilai mean, median dan modus variabel akuntabilitas sebesar 119,83, 121,00 dan 121. Hal ini berarti rata-rata jumlah skor kuisioner variabel transparansi berjumlah sebesar 110,63, nilai tengah berjumlah 118,00 dan nilai yang sering muncul 121. Nilai standar deviasi sebesar 8,585.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,28133228
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,073
	Negative	-,122
Kolmogorov-Smirnov Z		,668
Asymp. Sig. (2-tailed)		,763

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dalam tabel 4.2 diatas hasil nilai Asym. Sig adalah 0,763, hasil ini bila dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,476	3,157		,468	,644		
Transparansi	,339	,121	,362	2,795	,009	,686	1,459
Akuntabilitas	,410	,093	,570	4,399	,000	,686	1,459

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dalam tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa, upaya penghitungan nilai tolerance dari dua variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) mempunyai nilai masing masing 0,686 dan 0,686 adalah lebih dari 0,10.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,590	1,999		1,296	,206
Transparansi	,015	,077	,043	,192	,849
Akuntabilitas	-,071	,059	-,270	-1,198	,241

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel transparansi dan akuntabilitas lebih besar 0,05 yaitu sebesar 0,392 dan 0,088. Jadi dapat disimpulkan tidak ada unsur heteroskedastisitas, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi

1. Koefisien Determinasi (R-Squares)

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	.689	.666	1,328

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa menunjukkan angka determinan R-Squares yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan variabel transparansi dan akuntabilitas dapat menjelaskan variabel pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlungu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Hasil analisis regresi menunjukkan R sebesar 0,830 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hubungan yang kuat karena angka tersebut diatas 75%.

R-Squares menunjukkan angka 0,689 atau 68% yang berarti bahwa variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel dependen (pengelolaan alokasi dana desa) sebesar 68% selebihnya 32% disebabkan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Seperti faktor- partisipasi, pengawasan, kompetensi SDM dan lain sebagainya. Nilai R-Square 68% , hal itu berarti bahwa variabel R-Square menunjukkan model sedang hal itu disebabkan oleh dua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Uji Signifikansi F (Uji F)

Tabel 6 Uji Signifikansi F (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	105,354	2	52,677	29,872	.000
	Residual	47,613	27	1,763		
	Total	152,967	29			

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 29,872 semetara nilai Ftabel sebesar 3,34. Hasil regresi berganda juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha (0,05). Hasil nilai F menunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlungu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

2. Uji Signifikansi (Uji T)

Tabel 7 Uji Signifikansi F (Uji F)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1,476	3,157		.644
	Transparansi	.339	.121	.362	.009
	Akuntabilitas	.410	.093	.570	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa untuk hipotesis pertama menyatakan terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlungu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.561>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan tanda positif yaitu $t_{hitung} = 2,795$ dan $t_{tabel} = 2,05183$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai signifikan yaitu nilai t_{hitung} sebesar 0,009 yang lebih kecil dari t_{tabel} 0,05 ($Sig\ t_{hitung} < t_{tabel}$) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan tanda positif yaitu $t_{hitung} = 4,399$ dan $t_{tabel} = 2,05183$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai signifikan t_{hitung} sebesar 0,000 yang lebih kecil dari t_{tabel} 0,05 ($Sig\ t_{hitung} < t_{tabel}$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan tabel 4.18 model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = 1,476 + 0,339X_1 + 0,410X_2 + e$$

Dimana : Y = Pengelolaan Alokasi Dana Desa

di Desa Panggeldlangu X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas E = Standar error

Persamaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 1,476 ; menunjukkan harga konstan dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu (Y) sama dengan 1,476.
- Koefisien X_1 (b_1) = 0,339 : menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu. Artinya jika transparansi ditingkatkan maka pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,339.
- Koefisien X_2 (b_2) = 0,410 ; menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu. Artinya jika akuntabilitas ditingkatkan, maka pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu akan meningkat sebesar 0,410.
- Standar error menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik. Hal itu dapat dilihat dari pada hasil pengujian regresi dimana transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai koefisien determinasi (R-Squares), diketahui bahwa nilai R-Squares = 0,689. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel dependen (pengelolaan alokasi dana desa) sebesar 68% selebihnya 32% disebabkan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Berdasarkan analisis menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengujian variabel transparansi menunjukkan nilai $t_{hitung} = 2,795 > t_{tabel} = 2,05183$ dan nilai signifikansinya $0,009 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Pada Variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,339 bernilai positif berarti transparansi mempunyai hubungan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%, maka dapat dikatakan jika ada peningkatan transparansi sebesar 100% maka akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%, begitu juga sebaliknya jika penurunan transparansi 100% maka akan menurunkan

pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%. Jadi transparansi berhubungan positif secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengujian variabel akuntabilitas menunjukkan nilai $t_{hitung}=4,399 > t_{tabel}=2,05183$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,410 bernilai positif berarti transparansi mempunyai hubungan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%, maka dapat dikatakan jika ada peningkatan akuntabilitas sebesar 100% maka akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%, begitu juga sebaliknya jika penurunan akuntabilitas 100% maka akan menurunkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%. Jadi akuntabilitas berhubungan positif secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi

3. Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji nilai F_{hitung} sebesar 29,872 semetara nilai F tabel sebesar 3,34.

Nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,000 lebih kecil daripada α (0,05). Hasil nilai F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α .

4. Oleh karena itu pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel, maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi belanja desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya.

Adapun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Desa Panggeldlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas 68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Seperti Faktor-partisipasi, pengawasan, kompetensi SDM dan lain sebagainya. Nilai R -Square 68% , hal itu berarti bahwa variabel R -Square menunjukkan model sedang hal itu disebabkan oleh dua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dapat ditarik kesimpulan Transparansi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai $t_{hitung}=2,795$ dan nilai $t_{tabel}=2,05183$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi t_{hitung} sebesar 0,009 dan nilai signifikansi t_{tabel} sebesar 0,05 ($\text{sig } t_{hitung} < t_{tabel}$) oleh karena itu H_{a1} terdukung secara statistik. Pada variabel transparansi diperoleh nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,339 bernilai positif berarti transparansi mempunyai hubungan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%, maka dapat dikatakan jika ada peningkatan transparansi sebesar 100% maka akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%, begitu juga sebaliknya jika penurunan transparansi 100% maka akan menurunkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 33,9%. Jadi transparansi berhubungan positif secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai $t_{hitung}=4,399$ dan nilai $t_{tabel}=2,05183$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi t_{hitung} sebesar 0,000 dan nilai

signifikansi t tabel sebesar 0,05 ($\text{sig} < t_{\text{tabel}}$) oleh karena itu H_a2 didukung secara statistik. Pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,410 bernilai positif berarti transparansi mempunyai hubungan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%, maka dapat dikatakan jika ada peningkatan akuntabilitas sebesar 100% maka akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%, begitu juga sebaliknya jika penurunan akuntabilitas 100% maka akan menurunkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 41%. Jadi akuntabilitas berhubungan positif secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil uji hipotesis membuktikan secara simultan bahwa variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji nilai F hitung sebesar 29,872 semetara nilai F tabel sebesar 3,34. Nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,000 lebih kecil daripada α (0,05).

Referensi

1. Auditya, L et al. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 2013: 21- 41 ISSN 2303-0348.
2. Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. (2012). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel. Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah.
3. Debi Putri Pertiwi (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money
4. Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 19 (Edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi ketujuh). Semarang: Universitas Diponegoro
5. Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbil. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
6. Latan, Hengky dan Selva Temalagi. (2013). Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Bandung: Penerbit Alfabeta
7. Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*.
8. Mardiasmo. (2004). Akuntansi sektor publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI
9. Nitisusastro, M & Tri Sekar Priyanti. (2013). Pedoman dan Bimbingan Penulisan Tugas Akhir. Politeknik Sawunggali Aji: Purworejo.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau) Vol.2 No.2 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384660&val=6445&>
14. Riduwan. (2011). Skala Pengukuran Variabel- Variabel Penelitian. Alfabeta: Bandung. (2015). Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
15. Sahdan, dkk. (2006). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Jakarta Selatan: Salemba Empat
16. Sanusi, A. (2013). Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
17. Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Andi Offset: Yogyakarta
18. Solekhan, Moch. (2012). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
19. Tanjung, Abdul Hafiz. (2014). Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM